yang bersifat mendesak guna mendukung upaya penegakan hukum seperti kendaraan yang dilengakpi dengan perangkat komputer dan printer yang bisa mobil sehingga dimanapun bisa melakukan kegiatan penyidikan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al Qur'an dan Hadist

2. Buku-buku

Akhmad Fauzi dkk, Status Lingkungan Hidup, Jakarta. 2013 hal 60.

- Effendi Tholib, *Dasar-dasar Hukum Acara Pidana*, Setara Press, Malang.2014 hal 7
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, *Penyidikan dan Penuntutan*, cet VII, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 110.
- Nico Ngani, I Nyoman Budi Jaya; Hasan Madani, *Mengenal Hukum Acara Pidana, Bagian Umum Dan Penyidikan*. Liberty, Yogyakarta, hal. 19
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hal 8.
- Moelyanto, Asas-asas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hal. 54
- Harun M. Husein, *Lingkungan Hidup, Masalah, pengelolaan dan Penegakan Hukumnya*, Bumi Aksara, Jakarta, 1995, hal 7
- Adami Chazafi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2002
- Ahmad Fauzi dkk, *Status Lingkungan Hidup 2012*, Pilar lingkungan Hidup Indonesia, Kementerian Lingkungan Hidup Indonesia, Jakarta. 2013
- Amir Syamsudin, *Integritas Penegakan Hukum di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 2014

- Arikunto, *Prosedur Penelitian, suatu Pendekatan Praktek, Edisi Ke Sembilan*, Rineke Cipta, Jakarta. 1993
- Effendi Tholib, Dasar-dasar Hukum Acara Pidana, Setara Press, Malang. 2014
- Harun M. Husein, *Lingkungan Hidup, Masalah, pengelolaan dan Penegakan Hukumnya*, Bumi Aksara, Jakarta. 1995
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penegakan KUHAP*, *Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar, Grafika, Jakarta.2012
- Ramlan Subakti, *Memahami Ilmu Politik, Kewenangan dan Legitimasi, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia*, Jakarta. 2010

3. Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservsi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981, Tentang Hukum Acara Pidana.

4. Internet

https://id.wikipedia.org/wiki/*Penyidik_Pegawai_Negeri_Sipil* https://blogmhariyanto.blogspot.com/2010/04/*penyidikan-tindak-pidana-kehutanan*.html

https://suduthukum.com/2017/04/pengertian-tinjauan-yuridis.html

5. Lain-lain

Hasil Wawancara Dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan wilayah Jabalnusra pada Seksi Wilayah 2 Surabaya, an. Samsul Hadi dan Probo Mulyarto Nawa, S.Si, Tanggal 10 juli 2019.